

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Belu

4.1.1 Keadaan Geografis dan Adminitrasi Kabupaten Belu

Kabupaten belu adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terletak di pulau Timor. Kabupaten ini merupakan yang baru saja mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Terletak di paling ujung pulau Timor wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Kabupaten Belu sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Dari segi astromi, wilayah ini terketa antara koordinat $124^{\circ} 38'33''\text{BT}$ - $125^{\circ}11'23''\text{BT}$ dan $08^{\circ} 56'30\text{ LS}$ – $09^{\circ} 47'30''\text{LS}$.

Secara geografi Kabupaten Belu meliputi wilayah dengan batas – batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan laut Timor Kabupaten Malaka
3. Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Timor Leste
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten TTU dan Malaka

Secara umum kabupaten Belu berikan tropis, dengan musim hujan yang pendek (Desember - Maret) dan musim kemarau yang panjang (April - November).

Luas wilayah Kabupaten Belu berdasarkan data buku Belu dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 1.2822,92 km² terdiri dari 12 kecamatan, 69 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan Tassifeto Barat adalah Kecamatan dengan wilayah t erluas dengan luas wilayah terkecil dengan luas wilayah 224,19 km² (9,17%). Sedangkan Kecamatan Atambua Barat adalah Kecamatan dengan luas wilayah terkecil dengan luas wilayah 15,55 km² (1,215).

Kabupaten Belu sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, memiliki panjang garis batas Negara yang dapat ditempuh dengan jalan darat antara Indonesia dan Timor Leste sepanjang 149,1 km. Ada kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yakni Kecamatan Tasifeto barat, Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen dan Lamaknen Selatan.

Di sepanjang perbatasan terdapat 6 pos Lintas Batas yang direncanakan sebagai hasil kesepakatan bilateral yaitu pos motain di kecamatan Tasifeto Timur, Pos Nunura dan Pos Turiskain di Kecamatan Raihat, Pos Memo, dan Pos Lakmaras di Kecamatan Lamaknen selatan, pos laktutus di Kecamatan Nanaet Duabesi.

4.1.2 Penduduk Kabupaten Belu

Jumlah penduduk yang besar baru akan menjadi modal dasar yang efektif bagi perkembangan nasional jika penduduk tersebut mempunyai kualitas yang baik. Pertumbuhan yang pesat akan berakibat pada sulitnya peningkatan kesejahteraan yang layak dan merata sehingga akan berakibat pada mutu

kehidupan sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidaklah mudah untuk dicapai. Dengan meningkatkannya jumlah penduduk dari tahun ke tahun maka akan berdampak pula terhadap luas wilayah tersebut.

Penduduk kabupaten Belu berdasarkan BPS pada Tahun 2016 , jumlah penduduk kabupaten Belu sebanyak 207.170 jiwa, laki – laki 102.751 jiwa dan perempuan 104.419 jiwa. Jumlah kepala keluarga 48.061 jiwa dan jumlah angkatan kerja sebanyak 93.254 jiwa yang sudah bekerja sebanyak 61.781 jiwa atau 66,25 persen. Sedangkan yang belum bekerja atau menganggur sebanyak 34.825 jiwa atau 37,34 persen.

Kabupaten Belu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 adalah sebanyak 193.478 jiwa yang terdiri atas 95. 533 laki – laki dan 97. 945 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2017 adalah 98 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki – laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 adalah 1,29 persen. Kepadatan penduduk sebanyak 1,61 jiwa per km² dimana yang terdapat pada kota atambua. Kepadatan penduduk paling rendah adalah Nanaet Duabesi 74.00 jiwa per km² dan sementara jumlah rumah tangga adalah 46,865.

Jumlah penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan/kota di Kabupaten Belu Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Raimanuk	7.319	7.707	15.026
2	Tasifeto Barat	11.224	11.543	22.767
3	Kakuluk Mesak	9.262	9.395	18.657
4	Nanaet Duabesi	2.016	2.193	4.209
5	Kota Atambua	13.782	14.759	28.541
6	Atambua Barat	11.067	10.784	21.851
7	Atambua Selatan	11.388	11.741	23.129
8	Tasifeto Timur	10.994	10.699	21.693
9	Raihat	5.994	6.212	12.206
10	Lasiolat	3.183	3.109	6.292
11	Lamaknen	5.527	5.934	11.461
12	Lamaknen Selatan	3.77	3.869	7.646
Total		95.533	97.945	193.478

Sumber data : BPS Kabupaten Belu, diolah 2018

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat di lihat Kota Atambua mempunyai jumlah penduduk tertinggi untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu dengan jumlah laki – laki sebanyak 13.782 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 14.759 jiwa dan jumlah seluruh penduduk Kota Atambua adalah 28.541 jiwa. Kecamatan Nanaet Duabesi mempunyai jumlah penduduk terendah untuk seluruh Kecamatan/kota di Kabupaten Belu dengan jumlah laki – laki sebanyak 2.016 jiwa dan perempuan sebanyak 2.193 jiwa dan total seluruh penduduk Kecamatan Nanaet Duabesi 4.209 jiwa. Penduduk Kabupaten Belu pada Tahun 2017 penduduk yang berjenis Kelamin Laki – laki sebanyak 95.533 jiwa dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 97.945 jiwa. Dan total keseluruhan Laki – laki dan Perempuan sebanyak 193.478 jiwa.

Berdasarkan hasil BPS Kabupaten belu 2017, angkatan kerja tahun 2017 berjumlah 97.869 jiwa atau 70,55 persen terhadap penduduk usia kerja. Dari

jumlah tersebut, sebanyak 97,53 persen berstatus kerja. tingkat pengangguran tercatat 1.581 jiwa di kabupaten Belu. jadi pekerja sendiri yang terdaftar pada tahun 2017 pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu adalah 13.163 jiwa atau 13,79 persen. Sedangkan pekerja keluarga/tidak kerja sebanyak 24.768 jiwa atau 25,95 persen. Pekerja buruh di Kabupaten Belu sebanyak 20.678 jiwa atau 21,66 persen.

Namun bukan angkatan kerja di Kabupaten Belu terdapat sebanyak 3.736 jiwa atau 9,15 persen. dari laki – laki sebanyak 2.513 jiwa atau 25,11 persen dan perempuan 1.223 jiwa atau 3,96 persen. adapun para pencari pekerja di Kabupaten Belu adalah 13.039 jiwa atau 32,07 persen dan laki – laki sebanyak 1.689 jiwa atau 16,88 persen dan perempuan sebanyak 22.323 jiwa atau 72,39 persen.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belu Tahun 2017

No	Kegiatan Utama	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	Angkat Kerja	58.910	38.959	97.869
	- Bekerja	57.329	38.126	95.455
	- Mencari pekerja atau pengangguran	1.581	833	2.414
2.	Bukan Angkatan Kerja	10.007	30.839	40.846
	- Sekolah	5.805	7.293	13.098
	- Urus Rumah Tangga	1.689	22.323	24.012
	- Lainnya	2.513	1.223	3.736
	Jumlah Total	68.917	69.798	138.715

Sumber: BPS. Belu dalam Angka 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa Jumlah angkatan kerja Kabupaten Belu Tahun 2017 Sebanyak 97.869 Jiwa, terdiri dari laki – laki sebanyak 58.910 Jiwa dan perempuan 38.959 jiwa, sedangkan yang bekerja

sebanyak 95.455 jiwa dan belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan sebanyak 2.414 jiwa.

Jumlah bukan angkatan kerja di Kabupaten Belu Tahun 2017 sebanyak 40.846 jiwa terdiri dari laki – laki sebanyak 10.007 jiwa dan perempuan sebanyak 30.839 jiwa dengan rincian yang bersekolah sebanyak 13.098 jiwa, terdiri dari laki – laki sebanyak 5.805 jiwa dan perempuan sebanyak 7.293 jiwa. Namun yang mengurus rumah tangga sebanyak 24.012 jiwa, terdiri dari laki – laki sebanyak 1.689 jiwa dan perempuan 22.323 jiwa dan lainnya sebanyak 3.736 jiwa, terdiri dari laki – laki sebanyak 2.513 jiwa dan perempuan sebanyak 1.223 jiwa.

4.1.3 Keadaan sosial dan Ekonomi di Kabupaten Belu

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Kemiskinan (GKNM). Perhitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan Minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan

minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 4.3
Penduduk miskin, presentasi penduduk miskin dan Garis kemiskinan di Kabupaten Belu 2013-2017.

Tahun	Penduduk miskin (ribu jiwa)	Presentasi penduduk miskin(%)	Garis kemiskinan (Rp/capital/bln)
2013	2,930	14,58	252.005
2014	5,450	14,24	263.659
2015	3,475	16,81	279.442
2016	3,313	15,82	300.914
2017	3,395	15,92	319.280

Sumber : Data BPS Kemiskinan Kabupaten Belu.

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu adalah 2,930 ribu jiwa atau sekitar 14,58 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp 252.005 capilat/bln. Tahun 2014 jumlah penduduk miskin di kabupaten Belu telah meningkat menjadi 5,450 ribu jiwa dan hanya presentasi penduduk miskin yang menurun menjadi 14,24 persen dengan garis kemiskinan yang meningkat menjadi Rp 263.659 capital/bulan. tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat lagi menjadi 3,475 ribu jiwa dan pada presentase penduduk miskin telah meningkat menjadi 16,81 persen dari tahun 2014 dengan garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 279.442 capital/bln. Namun terjadi lagi di tahun 2016 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 3,313 ribu jiwa dan presentasi penduduk miskin menurun juga menjadi 15,82 persen dengan garis kemiskinan yang meningkat menjadi Rp 300.914 capital/bln. Oleh karena itu demikian dengan juga pada tahun jumlah penduduk miskin meningkat lagi menjadi 3,395 ribu jiwa dan juga pula sekitar 15,95 persen

meningkat lagi. Dengan garis kemiskinan juga terus meningkat menjadi Rp 319.280 capital/bln dari 4 (empat) sebelumnya.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Belu Tahun 2013-2017.

No	Kecamatan/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Raimanuk	376	380	361	397	382
2	Tasifeto barat	411	474	453	434	436
3	Kakuluk Mesak	680	764	782	744	729
4	Nanaet Dubesi	112	100	104	106	105
5	Atambua kota	416	452	413	405	431
6	Atambua Barat	641	681	582	617	609
7	Atambua Selatan	588	541	558	537	583
8	Tasifeto Timur	466	421	446	459	455
9	Raihat	286	281	319	330	314
10	Lasiolat	159	154	145	159	170
11	Lamaknen	259	222	219	233	234
12	Lamaknen Selatan	197	177	180	184	203
	Kabupaten Belu	4,591	4,647	4,562	4,605	4,651

Sumber: Data BPS KabupatenBelu.

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu (12 Kecamatan). Dalam perbandingan rata-rata jumlah penduduk miskin di seluruh kecamatan Kabupaten Belu tahun 2013-2017, kecamatan Kakuluk mesak memiliki kemiskinan rata-rata 3,699 jiwa. Dimana kecamatan Kakuluk Mesak menduduki peringkat yang pertama termiskin di Kabupaten Belu. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu (12 Kecamatan) tahun 2013-2017, kecamatan Atambua Barat memiliki kemiskinan rata-rata 3,130 jiwa. Dimana Kecamatan Atambua Barat menduduki peringkat yang kedua termiskin di Kabupaten Belu dan Kecamatan Atambua Selatan memiliki kemiskinan rata-rata 2,807 jiwa. Dimana kecamatan Atambua Selatan menduduki peringkat ketiga termiskin setelah Kakuluk Mesak dan Atambua Barat.

4.2 Profil Tempat Penelitian

Penelitian ini di dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti dengan menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU 16 Tahun 1997 antara lain:

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya serta mandiri atau bersama dengan BPS.
2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

4.3 Sejarah Berdirinya Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

1. Masa Hindia Belanda

Didirikan tahun 1920 dengan tugas mengumpulkan data statistik Bea dan Cukai, dan bernaung di bawah Departemen *Lanbout Nijverheid en Handel*. Tanggal 24 September 1924 pusat kegiatan pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantoor Voord de Statistiek (CKS)*.

2. Masa Pemerintahan Jepang

Tahun 1942-1945, CKS beralih ke Pemerintahan Militer Jepang kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan Pemerintahan militer Jepang. Bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu) dengan nama “CHOSASITU GUNSEIKANBU”

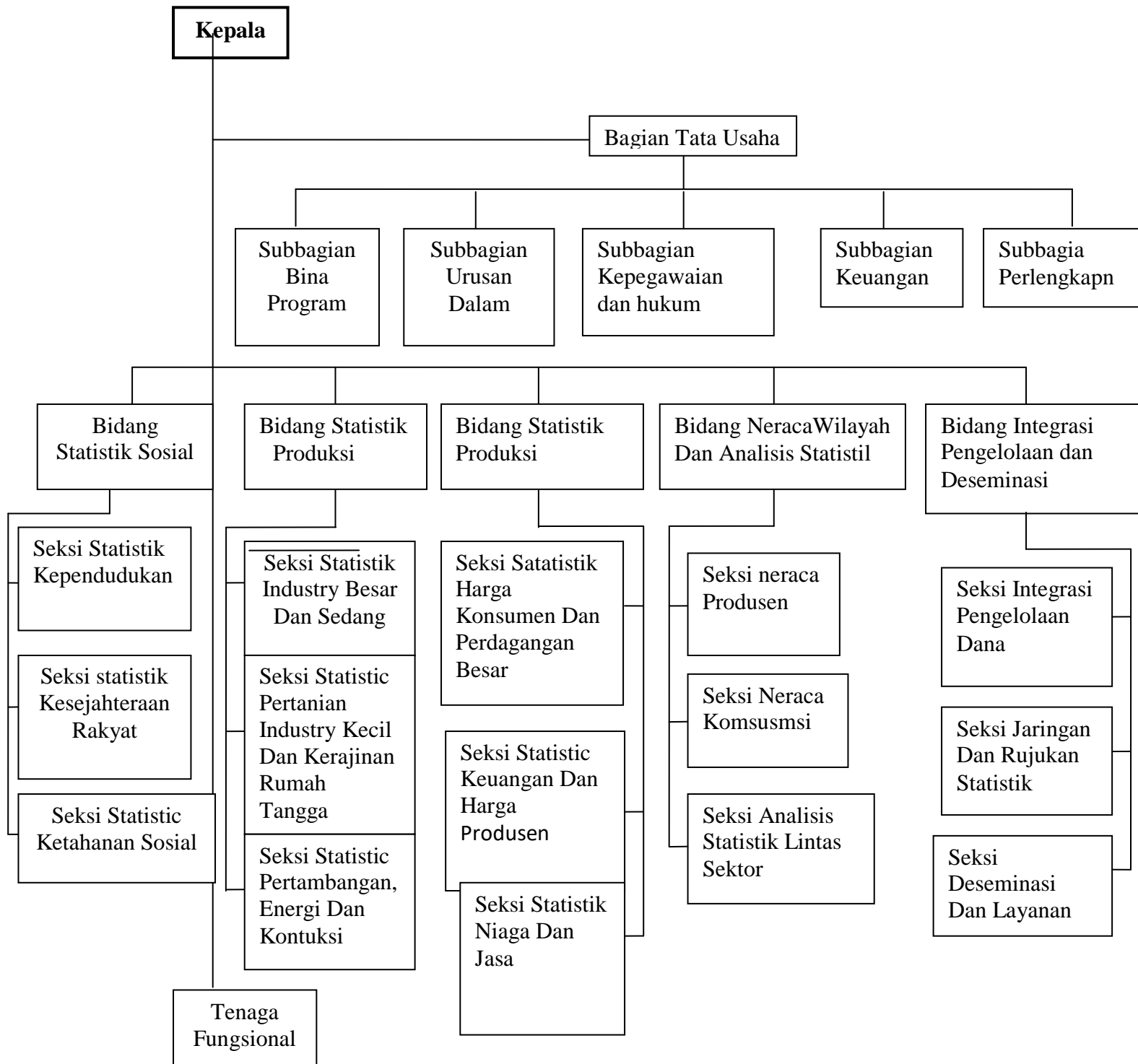
3. Masa Pemerintahan RI 1945-1965

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 ChoisasitsuGuenseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkat Umum (KAPPURI), yang dipimpin oleh Mr.Abdul Karim Pringgodigdo. Pada awal 1946 KAPPURI pindah keYogyakarta mengikuti pindahnya Pusat Pemerintahan RI ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh SEMAUN. Sementara itu di Jakarta Pemerintah Federal (BELANDA) menghidupkan CKS. Berdasarkan surat edaran Kementrian Kemakmuran 12 Juni 1950 No.219/SC, kedua kantor tersebut dilebur menjadi satu dengan nama “Kantor Pusat Statistik” dibawah Kementerian Kemakmuran.

Berdasarkan surat keputusan Presiden RI No 172/195, KPS diubah menjadi “Biro Pusat Statistik” (BPS), dan langsung berada di bawah Perdana Menteri. Pada tanggal 24 September 1960 denganUndang-Undang No.6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Statistik tanggal 26 September 1960 dengan Undang-Undang No.7 1960 ditetapkan bahwa “Badan Pusat Statistik” (BPS), ditugas sebagai penyelenggara Sensus (Pasal 2 UU No.7 tahun 1960).

Tahun 1961, untuk yang pertama kalinya BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk sejak masa kemerdekaan RI. Di tiap-tiap kantor Gubernur (Propinsi), Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus Penduduk. Tahun 1965, dengan Keputusan PredisiumKabinet No.Aa/C/9 Bagian Sensus di tiap kantor Gubernur dan Kabupaten/Kotamadya tersebut ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik

4.4 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu



4.5 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

4.5.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

Adapun Visi Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu ialah sebagai berikut :
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”.

Adapun Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegrasi dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

4.5.2 Nilai- Nilai Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

Nilai-nilai inti BPS terdiri dari :

1. Profesional
 1. Komponen
Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
 2. Efektif
Memberikan hasil maksimal.
 3. Efisien
Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.
 4. Inovatif
Selalu melakukan pembaruan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus.

5. Sistematis

Menyediakan bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu dengan yang lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

1. Dedikasi

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban..

2. Disiplin

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Konsisten

Satunya kata dengan perbuatan

4. Terbuka

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.

5. Akuntabel

Bertanggung jawab dan setiap langkahnyaterukur.

3. Amanah

1. Terpercaya

2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.

3. Jujur

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpan dari prinsip moralitas.

4. Tulus

Melaksanakan tugas konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.

5. Adil

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya

4.5.3 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pusat Statistik.

Adapun tugas dari Badan Pusat Statistik adalah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi BPS Kabupaten Belu:

1. Pengajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kegiatan statistik.
2. Pengkoordinasi kegiatan statistik nasional dan regional.
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar
4. Penetapan sistem statistik nasional
5. Pembinaan dan fasilitas terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik, dan
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang, perencanaan, umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan BPS Kabupaten Belu

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik,
 2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

3.6 Kegiatan Badan Pusat Statistik

1. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketetapan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan kalkulator dan alat hitung sipoa dalam mengolah data.

Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Personal komputer yang secara umum lebih mudah dan telah dicoba digunakan untuk menggantikan mainframe. Sejak 1980an, personal komputer telah digunakan di

seluruh kantor BPS, diikuti dengan penggunaan komputer di seluruh BPS kabupaten dan kota sejak 1992.

Dengan menggunakan data personal komputer, kantor statistik di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukan data mentah ke dalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional.

Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang ditetapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan.

Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Efektivitas dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain lebih cepat, juga dapat memotivasi pegawai yang terlibat turun bertanggung jawab untuk menghasilkan sebanyak mungkin data statistik dan indikator secara tepat waktu dan akurat dibanding sebelumnya. Selain itu, penggunaan komputer sangat mendukung BPS dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator-indikator yang rumit seperti kemiskinan, Input-Output (I-O) table, Social Accounting Matrix (SAM), dan berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.

Pada 1993, BPS mulai mengembangkan sebuah sistem informasi statistik secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah sampai unit

administrasi yang terkecil yang telah mulai dibuat secara manual sejak 1970. Data wilayah ini dibuat khususnya untuk mengkajikan karakteristik daerah yang menonjol yang diberikan oleh para perumus kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entri, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan kealihannya kepada staf BPS daerah.

Penggunaan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang diinginkan dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik, melakukan pembaharuan/inovasi dalam hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.

2. Analisis Data

Analisis terhadap data yang dihasilkan dari sensus dan survei BPS, dilaksanakan oleh Biro Analisis dan Pengembangan. Untuk menghasilkan analisis data yang optimal, BPS juga bekerjasama dengan para pakar dari perguruan tinggi di Indonesia dan badan-badan Internaional.

Kajian dan analisis data statistik diarahkan untuk dapat memahami dan memberikan perkiraan kuantitatif proyeksi berbagai bidang penting dari pembangunan nasional, untuk keperluan perencanaan, penyusunan kebijaksanaan dan pemantauan. Hasil-hasil analisis tersebut antara lain: Analisis Statistik

Industri Besar/Sedang, Analisis Pertambangan dan Gas Bumi, Analisis Statistik Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, Analisis Usaha Perusahaan Perikanan Lautan dan Tambak, Analisis Kependudukan, Analisis Fertilitas dan sebagainya.

BPS telah menetapkan status desa miskin berdasarkan PRODES 1990. Dari variabel yang ada diambil beberapa yang berhubungan dengan kemiskinan. Ada tiga kelompok variabel yang digunakan, yaitu: potensi variabel fasilitas desa, fasilitas perumahan dan lingkungan dan variabel keadaan penduduk. Setiap variabel ditentukan nilai skornya berdasarkan tiga kategori, kaya, sedang dan miskin. Kemudian dijumlahkan dan didapatkan total skor setiap desa. Total skor tersebut digunakan untuk menentukan status tiap desa.